



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROCHADI
2. Jabatan : ANGGOTA KOMISARIS
3. NHK : 817161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.675.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 527 m2/250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/400 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.805.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	427.900.000
1. MOBIL, TOYOTA COROLA CROSS HYBRID MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	10.736.795.304
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.557.025.674
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	19.432.220.978
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.432.220.978

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.